



PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PRAKTIK *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Rani Alifianti Herdian Putri, Anis Chariri¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Taxes are the biggest revenue source of state, so that practice of tax avoidance is strongly discourage by the government. But in fact, there are so many tax avoidance case done by companies that will make state get loss. This study aims to determine the effect of institutional ownership, managerial ownership and audit committee on tax avoidance simultaneously and partially in the automotive subsector listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2011-2015. The analytical method that was used are descriptive statistics and multiple linier regression analysis using SPSS. The results showed that financial distress gives positive effect significantly and managerial ownership gives negative effect significantly on tax avoidance. While board of directors give a result as it significantly positive on tax avoidance, hence board of committees and audit committee give negative effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, financial distress, good corporate governance

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan utama suatu negara untuk menunjang perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, serta sumber dana utama untuk penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Pajak merupakan pungutan negara yang ditujukan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan negara (Santoso, 2014). Dalam praktiknya sendiri, wajib pajak dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (UU Perpajakan no. 16 / 2009).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara dari manajemen pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak dari nominal seharusnya, namun dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau loop hole yang ada di dalam perundangan-undangan perpajakan (Santoso dan Ning, 2013). Umumnya, penghindaran pajak dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah proses di mana wajib pajak berusaha meminimalisasi jumlah utang pajak mereka, baik pajak penghasilan (PPh) maupun beban pajak lainnya, agar dapat dibayarkan dengan harga seminimal mungkin.

Financial distress (kesulitan keuangan) yang dialami perusahaan akibat menurunnya kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya risiko kebangkrutan, dapat meningkatkan potensi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak agar dapat tetap berdiri (Brondolo, 2009; Campello *et al.*, 2012). Jika risiko kebangkrutan sudah cukup tinggi, tak pelak lagi perusahaan akan secara agresif melakukan praktik penghindaran pajak dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Menurut Richardson *et al.* (2015),

¹ *Corresponding author*

terdapat beberapa implikasi pada peraturan pajak perusahaan ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Sebagai contoh, meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal (utang, pinjaman) yang dihadapi perusahaan yang mengalami krisis dan secara general, keinginan dari manajer untuk mengambil risiko yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui penghindaran pajak.

Corporate Governance juga memiliki andil dalam terjadinya kondisi financial distress yang dialami oleh perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang buruk pada perusahaan akan berdampak pada kinerja perusahaan secara berkelanjutan, menuntun kondisi keuangan perusahaan menjadi memburuk dan mengalami *financial distress* (Radifan, 2015). *Corporate governance* terdiri atas kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit. Isu tentang corporate governance di Indonesia mencuat pada tahun 1998 ketika krisis melanda. Beberapa pendapat mengemukakan lamanya proses pemulihan di Indonesia sebagai akibat dari lemahnya sistem *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Pendapat ini menjadi acuan bagi pemerintah maupun investor dalam memberikan atensi yang signifikan dalam praktik *corporate governance*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menemukan bukti empiris dari dampak dari *financial distress* dan *good corporate governance* (kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit) terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI periode 2011-2015.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Praktik *tax avoidance* perusahaan dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan dan juga bagaimana sistem *corporate governance* dijalankan oleh perusahaan. Teori agensi adalah teori dasar yang digunakan untuk memahami isu tentang *corporate governance*. Menurut Jensen & Meckling (1976), Teori agensi merupakan hubungan keagenan sebagai kontral kerja sama (*nexus of contract*) di mana satu atau lebih *principal* (pemimpin) menggunakan orang lain (agen) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Di sini, *principal* adalah mereka yang memegang saham, pemilik, dan investor. Sedangkan agen adalah orang yang ditunjuk oleh *principal* sebagai manajer untuk melaksanakan tugas yang diberikan dan pelaksanaannya dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

Penerapan dari system *corporate governance* sendiri berdasarkan pada teori agensi yang menjelaskan hubungan antara manajer dengan pemilik, di mana yang sudah disebutkan pada penjelasan sebelumnya di mana agen memiliki tanggung jawab moral pada *principal* untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat, dan sebagai imbalannya agen akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya. Hal ini juga akan mempengaruhi keputusan manajer ketika perusahaan mengalami *financial distress*. Manajer akan berusaha sekuat tenaga, bahkan memanfaatkan cara yang ada namun aman agar perusahaan tetap berdiri sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan praktik *tax avoidance*.

Financial Distress dan Tax Avoidance

Menurut Edwards *et al* (2012), ada beberapa implikasi untuk kebijakan pajak perusahaan ketika mengalami *financial distress*. Contoh, meningkatnya biaya modal, menurunnya sumber keuangan eksternal yang dihadapi perusahaan yang mengalami financial distress, dan lebih umumnya, keinginan manajer untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan mengambil risiko dengan praktik penghindaran pajak (Richardson, Taylor, & Lanis, 2015). Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress*, agar perusahaannya tetap berdiri, mau tidak mau mengambil risiko untuk lebih, dan lebih agresif dalam penghindaran pajak seiring kebutuhan akan kas semakin kritis, apalagi jika beban pajak perusahaan menjadi hal utama dalam *cash outflow*, mereka akan mengesampingkan kemungkinan reputasi negatif yang didapat karena secara agresif melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang terjebak dalam *financial distressed* berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka, atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor (Frank *et al.*, 2009).

Hanlon (2005) dan Blaylock *et al.*, (2012) melaporkan bahwa perusahaan yang memiliki perbedaan *book-tax* yang amat besar memiliki pendapatan serta arus kas yang lemah dibandingkan dengan perusahaan yang perbedaan *book-tax*-nya kecil. Penelitian ini menunjukkan hubungan signifikan antara antara rating kredit dan penghindaran pajak. Faktanya, lemahnya pendapatan atau tidak konsistennya pendapatan menghasilkan aliran yang jelas. Kesimpulannya, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara *financial distress* dan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1 : *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap praktik

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).

Kepemilikan Manajerial dan *Tax Avoidance*

Nuraeni (2010) berpendapat, masalah keagenan sebagian besar dipengaruhi oleh *insider ownership*, yaitu pemilik sekaligus pengelola suatu perusahaan. Semakin besar *insider ownership*, semakin kecil pula perbedaan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan karena manajer juga akan menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil (Demsey and Laber, 1993). Menurut Pramudito dan Sari (2015) meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial perusahaan akan menurunkan kecenderungan perilaku penghindaran pajak dalam perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajer akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam penentuan nasib perusahaan.

Jensen & Meckling (1976) berpendapat, meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen adalah salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* yang ditanggung perusahaan. Kepemilikan manajerial sendiri dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (*outsider ownership*). Pada penelitiannya, Pohan (2008) membuktikan jika kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak, di mana semakin besarnya porsi saham manajerial, maka perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri akan berkurang.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Ukuran Dewan Direksi dan *Tax Avoidance*

Dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance*. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan (Forum *Corporate Governance* Indonesia, 2002) . Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan sebagai target penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia. Irawan dan Farahmita (2012) membuktikan dalam penelitian mereka semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H3: Ukuran Dewan direksi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Ukuran Dewan Komisaris Independen dan *Tax Avoidance*

Dewan Komisaris memiliki andil dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan *Corporate Governance* dijalankan dengan benar. Semakin banyak total komisaris independen, pengawasan manajemen akan lebih ketat. Hal ini dikarenakan pihak manajemen umumnya memiliki sifat oportunistik (Forum *Corporate Governance* Indonesia, 2002). Sifat ini memotori motif di mana manajemen akan berusaha memaksimalkan laba bersih untuk meningkatkan bonus yang akan didapat, karena laba merupakan salah satu dari indikator utama

keberhasilan dari manajer. Salah satu caranya adalah menekan biaya pajak. Pada akhirnya, hal ini mendorong manajer menjadi seorang agresif pajak.

Namun demikian, hasil penelitian Pramudito dan Sari (2015) menunjukkan ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada perilaku *tax avoidance* karena ukuran dari dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi kebijakan akuntansi perusahaan, dalam hal ini kebijakan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H4: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Komite Audit dan Tax Avoidance

Tax avoidance biasanya dilakukan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, dan biasanya dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pemegang saham menaruh harapan yang tinggi pada manajer dan eksekutif lainnya sebagai agen dalam perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Komite audit, sebagai salah satu bagian dari manajerial memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan (Rizky, 2015).

Komite Audit wajib membantu Dewan Komisaris untuk memastikan jika laporan keuangan dan pelaksanaan audit (internal maupun eksternal) sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Komite audit dianggap sebagai nilai tambah perusahaan, di mana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* karena komite audit sudah menjadi salah satu komponen umum dalam *good corporate governance*. Karena pengawasan komite audit dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, dipercaya akan mengurangi agresifitas perilaku penghindaran pajak perusahaan. Maharani dan Suardana (2014) dalam penelitian mereka menemukan bagaimana komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Maharani dan Suardana (2014) menyatakan, perusahaan yang memiliki komite audit lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan komite audit akan mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H5: Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dari penelitian ini dihitung dengan memanfaatkan rumus *cash ETR* dengan mematok *rate* sebesar 25% di mana jika nilai yang didapat di bawah *rate* tersebut, perusahaan sampel cenderung melakukan penghindaran pajak.

Di sisi lain, penelitian ini menggunakan tingkat *financial distress* perusahaan serta komponen *corporate governance* (kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit) sebagai variabel independennya. *Financial distress* sendiri diukur dengan menggunakan Altman *Z-Score* sebagai berikut:

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$$

Di mana :

A = Aset lancar-utang lancar/ total aset

B = Laba ditahan /Total asset

C = Laba sebelum pajak / Total asset

D = Jumlah lembar saham x Harga per lembar saham / total utang

E= Penjualan / Total Aset

Dalam Altman *Z-Score*, potensi kebangkrutan akan tercermin dalam nilai Z. Jika nilai Z $\geq 2,99$, maka perusahaan tersebut berada di zona aman, di mana bebas dari distress. Bila nilai $1,81 < Z < 2,99$, artinya perusahaan masuk ke dalam zona abu-abu, Dan yang terakhir, jika nilai $Z < 1,81$, maka perusahaan berada di dalam zona distress. Kepemilikan manajerial adalah sejumlah saham

yang dimiliki oleh pengelola perusahaan. Saham ini umumnya dimiliki oleh komisaris, direksi, sekretaris perusahaan, atau karyawan dari perusahaan sendiri. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan penelitian Sabli dan Noor (2013) dengan rumus :

$$KM = \frac{\text{Total Saham Manajer}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Komposisi dari dewan direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta independen. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Masing-masing kedudukan anggota direksi termasuk direktur utama adalah sama. Ukuran dewan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan direksi (Subramanyam *et al*, 2009).

Dalam penelitian ini, perhitungan yang dipakai untuk menghitung ukuran dewan komisaris diambil berdasar penelitian Siallagan & Machfoedz (2006):

$$UDK = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Seluruh Dewan Komisaris}}$$

Komite audit dianggap sebagai nilai tambah perusahaan, di mana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* karena komite audit sudah menjadi salah satu komponen umum dalam *good corporate governance*. Karena pengawasan komite audit dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, dipercaya akan mengurangi agresifitas perilaku penghindaran pajak perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik komite audit yang berbeda. Penelitian ini menggunakan jumlah anggota komite audit suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010)

Penentuan Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*, yaitu perolehan informasi dengan pertimbangan tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002:131) dan memenuhi karakteristik yang disyaratkan. Kriteria sampel yang harus dipenuhi sebagai berikut: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2011-2015, 2) Selalu menyajikan annual report secara teratur per tahunnya, 3) Minimal, perusahaan sudah berdiri selama 10 tahun, dan 4) Memakai Rupiah sebagai satuan keuangannya.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Cash ETR} = & -0,816 - 0,187 \text{ Ln} \text{FINDIST} + 0,0005 \text{ KM} + 0,36 \text{ UDD ROA} \\ & + 0,207 \text{ UDKI} - 0,123 \text{ KA} + e \end{aligned}$$

Cash ETR	= Tax avoidance
LnFINDIST	= Financial distress
KM	= Kepemilikan manajerial
UDD	= Ukuran Dewan Direksi
UDKI	= Ukuran Dewan Komisaris Independen
KA	= Komite Audit

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015 yakni sebesar 399 perusahaan. Sampel diseleksi dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut adalah perinciannya:

Tabel 1
Perincian sampel penelitian

Kriteria	2011	2012	2013	2014	2015
Perusahaan manufaktur	144	144	148	152	154
Disajikan dalam mata uang asing	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)
Memiliki laba sebelum pajak negatif	(52)	(29)	(40)	(42)	(55)
Jumlah	67	90	83	85	74
Total sampel	399				

Statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FINDIST	399	-0.1700	52.6958	4.4735	5.3886
KM	399	0.0000	26.1800	1.5183	4.3923
UDD	399	2.0000	15.0000	5.2030	2.3557
UDKI	399	0.2000	0.8000	0.3853	0.0903
KA	399	2.0000	5.0000	3.1078	0.3763
CASHETR	399	0.0002	10.7041	0.4359	0.7014
Valid N (listwise)	399				

Variabel kondisi *financial distress* yang dihadapi perusahaan keuangan sampel yang diukur dengan *Z-Score* Altman diperoleh rata-rata sebesar 4,4735. Nilai *Z score* tersebut menunjukkan adanya tingkat kesehatan perusahaan yang baik. Nilai *Z-score* Altman terendah adalah sebesar -0,1700 (ARGO, 2013) dan nilai *Z-score* Altman yang tertinggi adalah sebesar 52,6958 (SMSM, 2014). Persentasi kepemilikan saham manajerial dari perusahaan sampel yang diukur rata-rata sebesar 1,5183 persen. Hal ini berarti bahwa rata-rata saham yang dimiliki jajaran direksi dan komisaris perusahaan adalah sebesar 1,6183% di mana kepemilikan manajerial terendah adalah sebesar 0,00% dan persentasi kepemilikan saham manajerial tertinggi adalah 26,18%. Deskripsi variabel ukuran dewan direksi (UDD) yang diukur dengan jumlah anggota dewan direksi menunjukkan rata-rata sebesar 5,2030 (dibulatkan 5). Jumlah anggota dewan direksi paling sedikit adalah sebanyak 2 orang dan jumlah anggota dewan direksi yang paling banyak mencapai 15 orang. Variabel proposi dewan komisaris independen (UDKI) menunjukkan rata-rata sebesar 0,3853 atau 38,53%. Rata-rata tersebut menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen dari perusahaan sampel rata-rata sebesar 38,53% dari seluruh jumlah dewan komisaris. Kondisi demikian menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan-perusahaan sampel telah memenuhi syarat minimal 30% anggota dewan komisaris independen. Jumlah terendah adalah sebesar 0,2000 atau 20,00% dan jumlah tertinggi mendapai 0,80 atau 80,00% anggota komisaris adalah komisaris independen. Ukuran komite audit (KA) dalam satu tahun dari perusahaan sampel rata-rata dari seluruh sampel diperoleh sebesar 3,1078. Dengan demikian berarti bahwa jumlah anggota komite adalah 3 orang. Jumlah komite audit terendah adalah sebesar 2 orang dan dan terbesar adalah 5 orang. Deskripsi mengenai penghindaran pajak yang diukur dengan *cash effective tax rate* (*Cash ETR*) menunjukkan rata-rata sebesar 0,4359. Hal ini berarti bahwa perusahaan mencatatkan pembayaran pajak yang dilaporkan dalam arus kas operasional perusahaan hingga sebesar 43,59% dari jumlah laba sebelum pajak pada perusahaan sampel. Nilai *Cash ETR* tertinggi adalah sebesar 10,7041 sedangkan nilai *Cash ETR* terendah adalah sebesar 0,0002 atau 0,02%. Nilai standar deviasi *Cash ETR* adalah sebesar 0,7014 yang mencerminkan adanya variasi *Cash ETR* yang besar.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah rendah, dikarenakan *Cash ETR* bernilai positif dan cenderung di atas 25%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas data merupakan syarat mutlak sebuah data dapat dianalisis menggunakan regresi. Pengujian normalitas data akan dilakukan dengan menggunakan rasio Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan secara univariate pengujian terhadap masing-masing variabel menunjukkan tidak berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi Uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Untuk itu dalam hal ini semua variabel diupayakan untuk berdistribusi normal. Langkah yang digunakan adalah dengan mengeluarkan data-data yang diindikasikan sebagai outlier dan transformasi logaritma natural. Pada data sejumlah 363 setelah melakukan transformasi \ln dan mengeluarkan data outlier sebanyak 36 data pengamatan, diperoleh hasil pengujian menunjukkan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,070 yang lebih besar dari 0,05.

Pengujian multikolinieritas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai Tolerance VIF dari output regresi. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 atau Tolerance yang lebih kecil dari 0,1 menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF dari variabel yang memiliki nilai lebih dari angka 10. Dengan demikian model regresi tersebut tidak masih memiliki masalah multikolinier. Dengan demikian model regresi tersebut sudah tidak memiliki masalah multikolinier.

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson yang berada diantara nilai du dan $4-du$ menunjukkan model yang tidak terkena masalah autokorelasi. Nilai DW diperoleh sebesar 2,043 yang berada diantara 1,80 dan $4-du = 2,20$. Hal ini berarti tidak ada masalah autokorelasi pada model regresi.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Hasil uji Glejser menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas jika diperoleh tidak ada yang signifikan. Hasil uji Glejser masih menunjukkan bahwa beberapa model uji masih memiliki signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada kedua model regresi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Perhitungan analisis regresi ini menggunakan bantuan program SPSS. Hasil perhitungan regresi dari print out SPSS diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3
Rekapitulasi hasil regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)				
	Ln.FINDIST				
	KM				
	UDD				
	UDKI				
	KA				

a. Dependen Variabel: Ln.CASHETR

Sumber : Data sekunder yang diolah

Hasil penelitian mendapatkan bahwa variabel Kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan ukuran komisaris independen memiliki koefisien dengan arah positif, sedangkan *Findist* dan KA memiliki koefisien dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan

kepemilikan manajerial yang besar, ukuran dewan direksi dan ukuran komisaris independen yang besar cenderung memiliki *Cash ETR*. Sebaliknya adanya kinerja keuangan yang tinggi serta komite audit yang lebih banyak akan cenderung melaporkan *Cash ETR* yang rendah.

Hasil pengujian model regresi ditunjukkan dengan nilai F dari hasil pengujian.

Tabel 4
Uji Model

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.053	5	1.811	4.791	.000 ^a
	Residual	134.907	357	.378		
	Total	143.960	362			

a. Predictors: (Constant), KA, UDKI, Ln.FINDIST, KM, UDD

b. Dependen Variabel: Ln.CASHETR

Hasil pengujian diperoleh nilai F pada Model tersebut diperoleh sebesar 4,791 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa model pengaruh variabel financial distress, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran komisaris independen dan jumlah komite audit secara bersama-sama memiliki kemampuan dalam menjelaskan tingkat *cash ETR* oleh perusahaan.

Koefisien determinasi pada model penelitian ini ditunjukkan dengan nilai adjusted R² (R square), dengan alasan nilai adjusted R² dapat naik atau turun jika terdapat penambahan terhadap variabel independen, sehingga pengujian lebih valid.

Tabel 5
Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.251 ^a	.063	.050	.61473	2.043

a. Predictors: (Constant), KA, UDKI, Ln.FINDIST, KM, UDD

b. Dependen Variabel: Ln.CASHETR

Nilai adjusted R² menunjukkan nilai sebesar 0,050. Hal ini berarti bahwa variabel *financial distress*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran komisaris independen dan jumlah komite audit mampu mempengaruhi *Cash ETR* sebesar 0,050 atau hanya 5,0%, dan selebihnya sebesar 95,0% *Cash ETR* dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil pengujian pengaruh *financial distress* Altman terhadap *tax avoidance* menunjukkan arah koefisien negatif. Nilai uji t diperoleh sebesar -4,450 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain perusahaan dengan *financial distress* yang besar cenderung melaporkan pajak lebih tinggi.

Hasil pengujian pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* menunjukkan arah koefisien positif. Nilai uji t diperoleh sebesar 0,014 dengan signifikansi sebesar 0,989. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *tax avoidance* menunjukkan arah koefisien positif. Nilai uji t diperoleh sebesar 2,153 dengan signifikansi sebesar 0,032. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* menunjukkan arah koefisien positif. Nilai uji t diperoleh sebesar 0,553 dengan signifikansi sebesar 0,581. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain perusahaan dengan komisaris independen yang besar tidak cenderung melaporkan pajak lebih rendah.

Hasil pengujian pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* menunjukkan arah koefisien negatif. Nilai uji t diperoleh sebesar -1,357 dengan signifikansi sebesar 0,176. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dari bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan di mana *financial distress* dan juga ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Sementara variabel kepemilikan saham manajerial, komisaris independen, dan komite audit perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*.

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pemegang saham perusahaan untuk memberikan perhatian khusus terhadap fenomena dalam kaitannya dengan pelaksanaan *good corporate governance* dan penghindaran pajak.
2. Perlunya kontrol dari BAPPEPAM dan BEI terhadap terpenuhinya *corporate governance* pada setiap perusahaan akan memberikan ketenangan para investor.
3. Perlunya memberikan perhatian khusus terhadap fenomena manajemen laba melalui pajak melalui pelaksanaan *good corporate governance*.
4. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian yang khusus ditujukan untuk mengembangkan model pengukuran efektivitas pajak lain, misalkan *Effective tax ratio (ETR)* atau *BTD*.

Implikasi dari hasil penelitian untuk penelitian mendatang adalah bahwa manajemen laba dapat dilakukan untuk meneliti secara lebih jauh mengenai motivasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satunya adalah berkaitan dengan upaya manajemen untuk mendapatkan bonus kinerja. Untuk itu faktor motivasi manajemen nampaknya dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi variabel penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu penelitian selanjutnya perlu memasukkan pajak tangguhan sebagai kontrol untuk mendapatkan bukti apakah pajak tangguhan adalah sebagai salah satu bentuk manajemen laba pajak.

REFERENSI

- Altman, E. I. (1968). The Prediction of Corporate Bankruptcy: A Discriminant Analysis. *The Journal of Finance*, 23(1), 193–194. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x/pdf>
- Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2006). *Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt*. Wiley.
- Arnold, B. J., & McIntyre, M. J. (2002). *International Tax Primer* (2nd ed.). Kluwer Law International.
- Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2012). Tax avoidance, large positive temporary book-tax differences, and earnings persistence. *Accounting Review*, 87(1), 91–120. <https://doi.org/10.2308/accr-10158>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>

- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(76254(3)), 537–546. <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2012). Financial Constraints and the Incentive for Tax Planning. *Working Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2163766>
- Fadhilah, F. N., & Syafruddin, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–15.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness to Aggressive and Its Relation Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hanlon, M. (2005). The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences. *The Accounting Review*, 80(1), 137–166. <https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.1.137>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Haruman, T. (2008). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Pendanaan (Perspektif Agency Theory). *National Conference on Management Research*, (November).
- Irawan, P. H., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi*, 15.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khoirunnisa. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi Ilmiah Universitas Lampung*.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *Skripsi Ilmiah Universitas Udayana*, 2(9), 525–539.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2014). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014), 1–11.
- Niarachma, R. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress: Studi Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2010. *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*.
- Nuraeni, D. (2010). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan. *Skripsi Ilmiah Universitas Diponegoro*.
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Skripsi Ilmiah Universitas Udayana*, 1, 259–275.
- Radifan, R. (2015). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress. *Skripsi Ilmiah Universitas Diponegoro*, 1–71.
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–9.
- Reza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*.



- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Sabli, N., & Noor, R. M. (2013). Measuring Internal And External Corporate Governance Mechanisms On Companies Tax Planning: Evidence From Shariah-Compliant Companies In Malaysia. *Journal of Administrative Science*, 1010(2).
- Santoso, T. B. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap penghindaran Pajak. *Skripsi Ilmiah Universitas Diponegoro*, 1–59.
- Siallagan, H., & Machfoedz, M. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, (61), 23–26.
- Sibarani, J. (2012). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kejatuhan Harga Saham Pada Perusahaan manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010. *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*.
- Simarmata, A. P. P. (2013). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2(Nomor 2), Halaman 1-10.
- Timothy, Y. C. K. (2010). Effects of corporate governance on tax aggressiveness. *Hong Kong Baptist University*, 18(6), 2691–2697. Retrieved from <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84942878415&partnerID=tZOtx3y1>